

ABSTRAK

Dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali terjadi konflik dua arah antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat hal ini terjadi karena Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagai aturan pelaksana, tidak mengatur terkait ganti kerugian non fisik pada tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga tidak ada suatu kepastian hukum ganti kerugian non fisik pada tanah ulayat. sehingga tertarik untuk diteliti dan dianalisa bagaimana kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Metode penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum pada tanah ulayat mengenai ganti kerugian non fisik dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Maka peraturan mengenai ganti kerugian non fisik dalam penjelasan pasal 33 huruf f harus dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selanjutnya dicantumkan secara eksplisit dan konkret dalam muatan materi batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehingga, tanah ulayat mendapatkan perlindungan hukum mengenai ganti kerugian bagi tanah ulayat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sehingga jalan terakhirnya adalah melakukan judicial review mengenai aturan ganti kerugian non fisik.

Kata kunci : Pengadaan tanah, ganti kerugian non fisik, kepastian hukum

ABSTRACT

In terms of land acquisition for public interest, there is often a two-way conflict between the government and customary law communities, this occurs because Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of land acquisition for development for public interest as an implementing rule, does not regulate non-physical compensation for customary land in land acquisition for public interest. So there is no legal certainty of non-physical compensation on customary land. So it is interested to be researched and analyzed how legal certainty and protection for customary law communities affected by land acquisition for public interest.

The statutory research method (statute approach) is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues being handled.

To ensure legal certainty in order to provide legal protection for customary land regarding non-physical compensation in land acquisition for public interest. Therefore, the regulation regarding non-physical compensation in the explanation of article 33 letter f must be contained in the body of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest. Furthermore, it is explicitly and concretely included in the content of the torso material of Government Regulation Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest. Thus, customary land receives legal protection regarding compensation for customary land in the acquisition of land for public interest. So the last resort is to conduct a judicial review of the rules for non-physical damages.

Keywords : Land acquisition, non-physical compensation, legal certainty